

---

## ISLAM DAN DEMOKRASI PADA AKHIR ORDE BARU: MEMBACA AUTOBIOGRAFI BISMAR SIREGAR

**Mhd. Alif Ichsan**

SMA Islam Plus Adzkia Medan  
Email: alifichsan97@gmail.com

---

### ABSTRAK

---

#### KATA KUNCI:

*Islam, Demokrasi, Orde Baru, Bismar Siregar*

*Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa yang melatarbelakangi pandangan Bismar Siregar terhadap Islam dan demokrasi, kemudian bagaimana beliau memandang praktek Islam dan Demokrasi pada akhir Orde Baru, dan sejauh mana peran beliau dalam memperbaiki wajah Islam dan Demokrasi pada akhir Orde Baru. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer, yang diperoleh melalui wawancara dan pembacaan terhadap autobiografi Bismar Siregar; dan sumber sekunder yang berasal dari artikel, berita media online, dan buku yang memberikan dukungan terhadap pembahasan. Penelitian ini merupakan bagian dari sejarah intelektual yang dikaji dengan konsep Islam dan demokrasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) hal yang melatarbelakangi pandangan Bismar Siregar terhadap Islam dan Demokrasi ialah lingkungan keluarga yang religius dan terdidik, 2) Bismar memandang bahwa praktek demokrasi pada masa Orde Baru masih belum dijalankan secara penuh dan berangkat dari pemahaman demokrasinya yang berlandaskan Islam, ia tidak bersepakat dengan demonstrasi dan konsep oposisi, 3) Sementara itu, peran Bismar Siregar dalam memperbaiki wajah Islam dan Demokrasi pada akhir Orde Baru ditunjukkan dengan harapan dan keterlibatannya di ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia) sebagai koordinator wilayah.*

---

### PENDAHULUAN

Sejarah intelektual yang menguraikan kesadaran atau ide-ide yang dimiliki seorang pemikir sudah banyak dilakukan. Akan tetapi masa terdapat ruang kosong yang dapat diisi bila ingin menulis tema ini. Banyak dilakukan, bukan berarti sering. Kemudian, masih terlalu banyak tokoh yang bisa dibahas. Setelah itu, walaupun hampir banyak pemikir yang telah menggagas pemikirannya ke dalam sebuah tulisan, autobiografi

misalnya, namun masih gagal menemukan formula yang tepat untuk diajukan sebagai sebuah gagasan dari masa lalu, atau hanya berujung kepada gagasan-gagasan yang terserak dan kisah-kisah yang hanya menarik untuk diketahui semata.

Bismar Siregar merupakan seorang pemikir yang menyimpan banyak pemikiran dan kesadaran. Ia berupaya untuk merespons keadaan. Upaya itu berangkat dari kegelisahan, yang merupakan bagian dari kejiwaan (*mentifact*) (Kartodirdjo, 1992). Sayangnya, meskipun Bismar Siregar merupakan seorang Hakim Agung sejak tahun 1984 hingga awal Reformasi, namun tulisan yang menggali pemikiran-pemikiran beliau masih jarang ditemukan. Adapun tulisan yang mengungkapkan isi kepala beliau lebih sering diutarakan secara langsung olehnya melalui buku-buku yang ia tulis sebagai autobiografinya (Bismar, 2002).

Sebagai seorang intelektual, Bismar Siregar merupakan sosok yang kontroversial pula. Ia merupakan seorang Sarjana Hukum namun pemikirannya banyak yang mencerminkan nilai-nilai keislaman. Beliau sangat menjunjung tinggi hukum, namun tidak memahami hukum sebagai seperangkat aturan yang harus ditegakkan secara absolut. Ia pernah memvonis seorang pria yang memperkosa pasangannya dengan pasal pencurian (Fadillah, 2013). Oleh karena itu menarik untuk menguraikan pandangannya terkait isu yang tidak kalah penting yakni, Islam dan Demokrasi. Sebagaimana kita ketahui, Islam dan Demokrasi merupakan hal yang cukup layak mendapat perhatian pada masa Orde Baru dan akan tetap menjadi bahasan yang menarik pada periode-periode setelahnya.

Tulisan sederhana ini akan fokus membahas mengenai Islam dan Demokrasi pada masa Orde Baru melalui pemikiran atau respons yang disampaikan oleh Bismar Siregar di dalam autobiografinya. Oleh karena itu, pembahasan di dalam kajian ini berangkat pada setidaknya tiga pertanyaan: 1) Apa yang melatar belakangi pemikiran Bismar Siregar?, 2) Bagaimana pandangan Bismar Siregar terhadap praktek Islam dan Demokrasi pada masa Orde Baru?, dan 3) Sejauh mana Bismar Siregar terlibat di dalam upaya memperbaiki wajah Islam dan Demokrasi pada masa Orde Baru?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam Sumber yang dipakai di dalam penelitian ini didasarkan pada sumber primer. Sumber primer itu merupakan autobiografi yang ditulis oleh Bismar Siregar, yang

juga di dalamnya memuat berita, tulisan teman-teman, kliping dan arsip mengenai beliau. Adapun sumber sekunder yang dihimpun melalui artikel pada jurnal dijadikan sebagai pelengkap dan pembanding. Sumber-sumber tersebut kemudian dikritik sehingga menghasilkan data yang siap digunakan. Data itu kemudian diinterpretasikan melalui seperangkat konsep, untuk kemudian menjadi narasin sejarah yang utuh. Kajian ini dibatasi di Indonesia dan untuk periode Orde Baru, tepatnya pada akhir rezim tersebut, pada tahun 1980 – 1990-an.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tulisan ini ada baiknya dimulai dengan bagaimana pribadi Bismar Siregar terbentuk, sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam biografinya. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pandangan Bismar Siregar terkait dua isu penting pada masaa Orde Baru, yakni Islam dan Demokrasi. Terakhir, kita akan mencoba mengungkap peran Bismar Siregar di dalam memperbaiki wajah Islam dan Demokrasi pada masa Orde Baru itu.

### **A. Bismar Siregar: Dari Kampung ke Mahkamah Agung**

Bismar bukan berasal dari keluarga kaya atau lingkungan kota yang glamor. Ia lahir dari rahim seorang ibu pedagang kue di pasar dan ayah yang merupakan seorang guru (Machrani,2020). Ayah pria kelahiran Siabu, 15 September 1928 ini bahkan pernah berkirim surat kepada abangnya, yang kebetulan ditemukan Bismar, dan mengaku bahwa ia hanya makan nasi satu kali dalam sehari. Mereka sekeluarga juga pernah hanya memiliki beberapa potong ikan untuk lauk, sementara saudara-saudari Bismar seluruhnya berjumlah belasan, sehingga ikan tersebut dibagi sedikit-sedikit agar cukup untuk semua anggota keluarga. Namun, meskipun hidup dalam situasi yang tergolong miskin, Bismar terkenal akan kepintarannya. Meskipun tidak tamat Sekolah Rakyat (SR) karena pendudukan Jepang, namun beliau pernah dipercaya sebagai penerjemah untuk Jepang pada masa itu. Kecerdasannya juga membawa Bismar ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Magelang, meskipun tidak memiliki ijazah SR. Kehidupan yang demikian itu membentuk pribadi Bismar yang tangguh sekaligus perhatian terhadap sesama (Rodee, 1988).

Bismar juga terkecal teliti dan teguh pendiria, serta lantang menyuarakan kebenaran sejak belia. Hal itu dibuktikan oleh kesaksian Machrani Siregar, adik kandung beliau. Ia pernah ditegur oleh Bismar hanya karena tidak memperhatikan secuil daun ubi yang masih menempel di peralatan memasak, padahal sudah yakin dicuci dengan bersih. Bismar juga keras dalam mengajari adik-adiknya. Hal itu cukup membuat takut sang adik jika belajar dengan beliau.

Sementara itu, karakter beliau yang islami didapatkannya dari keluarga, yakni ayah dan ibunya, masing-masing merupakan pengurus Muhammadiyah dan ‘Aisyiah di Siabu. Lingkungan keluarga yang memperhatikan betul syariat Islam, apalagi Muhammadiyah merupakan organisasi yang menuntut Al-Quran dan Sunnah tercermin di dalam perilaku warganya (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2001). Muhammadiyah sebagai organisasi juga menuntut warganya berpikir kritis. Kebiasaan berpikir kritis dan tidak tinggal diam melihat penyimpangan juga merupakan karakter sang ayah, Aminuddin Siregar, yang kerap membuat laporan atas segala sesuatu yang tidak beres. Semangat itu kiranya turun pula kepada Bismar.

Setelah lulus dari SMA pada usia 24 tahun, Bismar melanjutkan studi di kampus kenamaan di Indonesia, yakni Universitas Indonesia. Di sana Bismar menimba ilmu hukum, yang kemudian menjadikannya bergelut sebagai seorang jaksa setamatnya dari perguruan tinggi pada tahun 1956. Sebagai seorang jaksa, ia berulang kali dipindah tugaskan. Ia mengawali tugasnya pada tahun 1957 di Palembang, lalu harus pindah ke bagian timur Indonesia sebanyak dua kali, yaitu ke Makassar dan akhirnya ke Ambon. Akan tetapi profesi jaksa bukan merupakan tidak ditakdirkan Tuhan seterusnya bagi Bismar. Hal itu dikarenakan profesi Jaksa menuntut Bismar untuk berpisah dengan istri, hingga harus bertengkar dengan Jaksa Agung, pimpinannya sendiri. Beliau yang dibayang-bayangi oleh pemecatan karena lebih memilih menemani istri di Jakarta daripada bertugas di Ambon, akhirnya memilih beralih profesi sebagai hakim.

Hakim adalah jalan yang ditempuh Bismar mencapai “keagungan”, sementara sebelumnya ia hanyalah seorang pemuda dari kampung. Ia juga mengawali karir Hakimnya dari Palembang, Pangkal Pinang tepatnya. Karir hakim Bismar melejit menjadi ketua Pengadilan Negeri di Pontianak setelahnya dan berhasil menjadi hakim tinggi sejak selama dua tahun, sejak 1980 di Bandung. Perjalanan Bismar sebagai hakim akhirnya

berujung pada posisi Hakim Agung, sejak 1984 hingga tahun 2000. Selama menjabat sebagai Hakim Agung, terutama periode akhir akhir dari perjalanan karirnya itulah Bismar mulai banyak menulis, sebagai respons terhadap praktek demokrasi dan Islam pada masa Orde Baru, yang ia sampaikan dengan karakternya yang lantang dan cermat.

### **B. Bismar: Demokrasi tidak Islami**

Bismar memang tidak begitu sepekat dengan demokrasi. Menurutnya Demokrasi adalah budaya luar yang tidak berasal dari dunia Islam.<sup>28</sup> Akan tetapi Bismar tidak pula menolak demokrasi seluruhnya, melainkan mengembalikan pemaknaan dan pelaksanaan demokrasi itu kepada nilai-nilai yang terkadang dalam Pancasila. Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar bagi penerapan demokrasi dapat diamalkan secara Islami. Oleh karena itu, jikapun demokrasi itu telah dipahami sebagai sesuatu yang bebas, Bismar menghendaknya tetap dalam pengendalian diri yang benar.

Penerapan demokrasi yang benar harus dilaksanakan dari presiden, begitulah yang dipahami oleh Bismar. Hal itu salah satunya juga merupakan respons terhadap apa yang telah berlaku selama masa Orde Baru. Beliau juga mendasari pandangannya itu kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab terhadap yang dipimpin. Harapannya, ketiak pemimpin berhasil menjalankan pemerintahan yang demokratis, maka masyarakat di bawahnya akan mengindahkan seruan itu pula.

Terkait dengan demokrasi pada masa Orde Baru, Bismar Siregar dengan lantang menyatakannya sebagai “awal pemerkosaan demokrasi Pancasila”. Bismar tidak ragu untuk menyatakan hal yang demikian itu. Demokrasi menjadi barang asing selama masa Orde Baru. Hal itu dibuktikan dengan Soeharto, melalui Partai Golkar (Golongan Karya) yang berkuasa selama 32 tahun.

Penganggakan terhadap demokrasi itu juga disaksikan oleh Bismar mewujud di dalam maraknya korupsi pada masa Orde Baru. Bismar bahkan menambahkannya dengan “korupsi, kolusi, dan perbuatan tercela lainnya”. Beliau melalui tulisannya, dengan terang-terangan menagih janji Harmoko untuk memberantas praktek korupsi itu di kalangan Golkar pula, apalagi termasuk janji kampanye pada tahun 1993.

Beberapa praktek yang tidak demokratis dan cenderung melindungi elite Golkar pada masa Orde Baru ditunjukkan oleh kejanggalan demi kejanggalan yang ia temukan sendiri pada institusi yang ia pimpin, Mahkamah Agung. Kesaksian itu semakin menunjukkan kekuatan pandangan mengenai praktek demokrasi pada masa Orde Baru, sebab Bismar melihatnya dari dalam, dari “ruang kerja”-nya. “Sebut sajalah di lingkungan Mahkamah Agung dihebohkan ada kolusi, tetapi disangkal, walau diakui benar ada kesalahan prosedur. Menyusul di Kejaksaan Agung, ada penggantian mendadak, seorang di antara Jaksa Agung Muda, walau tidak jelas “dakwaan”, namun perlu segera diadakan penggantian. Kemudian menyusul tiga pejabat teras Bank Indonesia dibebaskan sementara dari jabatan, menyangkut bank bermasalah.”

Permasalahan yang dikemukakan oleh Bismar Siregar itu mengungkap bentuk keanehan yang berlatar perlindungan Golkar terhadap perilaku korupsi di antara para elitnya. Demi melindungi para pelaku tindak kecurangan itu, terjadi penetrasi terhadap lembaga-lembaga strategis yang berhubungan dengan kasus tersebut, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Bank Indonesia. Tindakan itu disindir Bismar sebagai: “salah satu bukti konsistensi Golkar melaksanakan tugas sebagai orsospol tunggal, baik dalam cabinet khususnya, pemerintahan umumnya, badan legislatif tidak terkecuali, dan lembaga tinggi negara lain, serta jajarannya semua diwarnai kegolkaran”.

Bismar juga menyentil demokrasi yang tidak berjalan baik ketika memasuki masa kampanye. Pada masa kampanye, seluruh elite Golkar, bahkan setaraf menteri dapat tidak ikut sidang cabinet dan meninggalkan tugas kenegaraan dengan dalih cuti, demi menjadi juru kampanye. Mereka bertugas untuk meyakinkan masyarakat bahwa Golkar masih setia dalam memberantas pelaku dan perilaku korupsi-kolusi di pemerintahan.

Pada kesempatan lain, Bismar juga mempertanyakan semangat demokrasi yang dimiliki oleh para pejabat di lingkungan pemerintahan Orde Baru itu dalam memberantas kemiskinan. Jawaban Harmoko, terkait kemungkinan adanya kolaborasi dengan orsospol (organisasi sosial politik) lain dalam mewujudkan pembangunan, adalah semuanya merupakan wewenang mandataris MPR. Pernyataan itu mengundang reaksi dari Bismar yang menyatakan bahwa hal itu bukan demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Dalam pemahaman Bismar, jawaban itu seolah mengkotak-kotakkan dan tidak mencerminkan semangat kebersamaan, yang merupakan nafas dari demokrasi yang dianut Pancasila.

Jelas saja bahwa Bismar tidak mendukung sikap petinggi Golkar yang demikian dan sudah melembaga selama pemerintahan Soeharto. Bismar menuntut kembali kepada demokrasi Pancasila, yang merangkul keberagaman dan tidak melayani satu golongan saja.

Demokrasi yang dipahami Bismar sebagai kebersamaan juga menjadikannya bersikap lunak terhadap eks-PKI. Dalam sebuah pemberitaan pada tahun 1994, diungkapkan bahwa Bismar menginginkan agar seruan “bersih diri” dan “bersih lingkungan” tidak lagi menjadi masalah di tengah masyarakat. Ia berharap agar mereka yang merupakan keturunan PKI diberikan kehidupan yang semestinya. Hal itu juga didasarkan oleh Bismar kepada keyakinan Islam yang dianutnya dengan teguh bahwa “dalam agama Islam tidak membenarkan dosa seseorang harus dipikul oleh orang lain”. Akan tetapi terdapat catatan dari Sulangkah Suwalu dalam Autobiografi Bismar yang menyatakan bahwa Bismar Siregar “keberatan diungkapkan kembali G30S”. Sepertinya Suwalu kurang tepat dalam memaknai sikap Bismar itu. Berdasarkan pemberitaan yang lebih dahulu kita kemukakan, Bismar hanya tidak ingin masalah berlarut-larut dan sementara itu ia juga berada di pihak agar masing-masing pihak cukup mengetahui kesalahan dan melangkah kepada kehidupan yang lebih baik dengan saling menerima tanpa justifikasi terhadap masa lalu yang buruk oleh para pendahulu mereka. Suwalu bahkan menutup simpulannya dengan kata-kata yang merendahkan Bismar Siregar bahwa dengan sikapnya itu beliau “telah menghina dirinya sendiri sebagai hakim yang tidak agung”. Hebatnya, Bismar mengutip pernyataan itu di dalam buku Autobiografinya secara utuh dan tanpa komentar ataupun pembelaan terhadapnya.

Dua bulan sebelum aksi demonstrasi yang berlangsung pada Sabtu, 27 Juli 1996, Bismar telah memberikan pandangannya terkait dengan hal itu. Peringatan itu disampaikannya melalui sebuah tulisan yang berjudul *Demo....Akhlik Setan!*, bertanggal 15 Mei 1996. Demonstrasi menurutnya bertentangan dengan semangat Islam, karena biasanya berisi kata-kata yang menyulut amarah dan hinaan. Bismar cenderung mengajak kepada cara- cara yang ditunjuki Al Quran dan Sunnah yang ia pahami bahwa untuk menyampaikan pendapat adalah lebih baik dengan cara saling nasehat-menasehati dan menyerahkan kepada Allah jika yang diberi peringatan itu masih tidak mengindahkannya. Demikianlah, Bismar tidak mendukung aksi demonstrasi dan menganggap apa yang lumrah dalam dunia demokrasi itu juga bertolak belakang dengan demokrasi Pancasila.

Bismar berpandangan bahwa menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi itu hanya membawa mudharat yang lebih parah dan tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, meskipun Bismar ikut gelisah terhadap apa yang terjadi pada masa Orde Baru, namun ia tidak melihat penyelesaiannya pada demonstrasi, melainkan dapat ditempuh melalui cara-cara yang konstitusional. Bismar berkaca kepada masa-masa terburuk ketika revolusi pecah di Indonesia dan hal tersebut tidak diinginkan Bismar terjadi kembali.

Oposisi dalam berdemokrasi sesuai dengan Pancasila juga tidak dibenarkan oleh Bismar. Hal itu tercermin pada tulisannya terkait dengan pemilu (Pemilihan Umum) yang akan dilangsungkan pada tahun 1997. Pemilihan Umum itu merupakan pemilu ke-7 sejak Indonesia merdeka (Firdausi, 2019). Pemilu tersebut ditujukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berada pada tingkat pusat hingga daerah dan diikuti oleh tiga partai politik, Golkar, PPP, dan PDI.

Pada masa itu sikap golput (golongan putih) untuk tidak ikuti pemilihan mengemuka. Hal itu didasarkan pada sikap apatis terhadap pemerintahan Soeharto dan menandakan gejala akhir dari rezim tersebut. Akan tetapi Bismar masih berada dalam barisan yang mengajak kepada para pemilih agar tetap menggunakan hak pilih. Beliau menyarankan agar siapapun yang terpilih dipandang sebagai milik Indonesia, apalagi jika dapat menampung PPP dan PDI di dalamnya, bahkan lebih baik lagi jika seluruh elemen bangsa dapat bergabung. Gagasan kebersamaan dalam berdemokrasi inilah yang konsisten digaungkan oleh Bismar.

Sementara itu dalil Islam yang dibawa oleh Bismar untuk mendukung gagasannya dalam menolak konsep oposisi ditunjukkan dalam tulisannya yang berjudul Oposisi dalam Islam, yang bertanggal 11 Maret 1997. Ia kembali mengkritik paham demokrasi yang berkembang di Barat, bahwa untuk yang tidak sependapat dipandang sebagai lawan. Bismar dengan memegang nilai keIslaman yang ia yakini, mengajak untuk “memantapkan semangat kebersamaan”, bahwa tidak perlu menganggap yang tidak sependapat sebagai lawan. Pada dasarnya, yang tidak diinginkan Bismar adalah perpecahan dan saling melontarkan kata-kata kasar di dalam bernegara, yang menurutnya bertentangan dengan pesan Rasulullah, salah satunya dalam hal larangan memaki-maki pemimpin.

### **C. ICMI: Harapan Ummat di Akhir Orde Baru**

Diksi yang dipilih oleh Kuntowijoyo dalam membahas komunitas muslim adalah dengan kata *Ummat* (Kuntowijoyo, 1987). Komunitas ini menurut Kuntowijoyo kerap dialienasi dalam proses perpolitikan dan kerap kali tidak diberikan tempat atau posisi sebagai penentu kebijakan. Menjelang akhir Orde Baru, pemerintah mulai menaruh perhatian kepada Ummat ini. Pemerintah, melalui Golkar, memberikan bantuan kepada sejumlah institusi keIslaman. Para ulama kenamaan bahkan juga dijadikan tim sukses kampanye Golkar pada beberapa kesempatan. Hal itu dipandang Kuntowijoyo sebagai cara Golkar membelah Ummat. Salah satu yang diwariskan Orde Baru kepada Ummat ialah ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Se- Indonesia).

ICMI diresmikan oleh Soeharto pada 6 Desember 1990. ICMI menjadi harapan baru bagi Ummat yang pada masa-masa sebelumnya terpecah dan sering kali dialienasi dari politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, meskipun pemerintah-lah yang membentuk ICMI, namun sebagian orang masih berharap agar ICMI tidak menjadi penyokong pemerintah atau *underbow* pemerintah, melainkan dapat bertindak secara independen. Berdasarkan pandangan itulah dapat dikatakan bahwa ICMI merupakan harapan Ummat pada Akhir Orde Baru (Hefner, 1993).

Menurut Hefner sebenarnya ICMI terbentuk atas dua pra-karsa kelompok muslim, yakni yang berasal dari pemerintah dan non-governmental. Harapan baru untuk Ummat salah satunya memang terletak pada kelompok non-governmental itu. Akan tetapi, karena menyadari organisasi ini merupakan bentukan pemerintah dan mencurigai ujungnya adalah demi kesuksesan Soeharto dalam pemilu, maka ada pula kelompok yang tidak simpatik dan menuduh ICMI sebagai alat politisasi Islam. Suara semacam itu diwakili oleh Deliar Noer, Djohan Effendi, Ridwan Saidi, dan Abdurrahman Wahid.

Sementara itu, Bismar Siregar masih menaruh harapan yang positif terhadap ICMI. Kita telah mengetahui sebelumnya bagaimana sikap beliau pula terhadap demokrasi pada masa Soeharto. Akan tetapi, Bismar memandang ICMI membawa semangat baru bagi Islam di pemerintahan. Ia juga menghargai usaha Soeharto dalam memprakarsai berdirinya organisasi keIslaman itu. Hal itu juga ditunjukkan Bismar, yang pada tahun 1999, setelah lengsernya Soeharto juga menjadi bagian dari ICMI, sebagai koordinator wilayah Sumatera.

Dilandasi oleh keyakinan Islamnya, Bismar tidak mempermasalahkan kasus Soeharto lainnya dan curiga terhadap niat Soeharto dalam membentuk ICMI. Bismar sungguh- sungguh mengungkapkan bahwa membentuk ICMI merupakan jasa besar Soeharto. Akan tetapi, Bismar juga pada dasarnya menyadari bahwa ICMI sejak Orde Baru hingga reformasi masih menjadi “bulan-bulanan”. Bismar menaruh harapan besar kepada ICMI agar dapat menjadi corong dalam menyuarakan keadilan dan perbaikan, bukan semata-mata dalam membela Soeharto, melainkan mengenang akan jasanya.

Bismar menghendaki ICMI berdiri sebagai wakil Ummat dalam menasehati dan memperingatkan Umara (pemerintah). Posisi yang demikian sejatinya untuk meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah. Sayang sekali, kesadaran Soeharto akan hal yang demikian baru terwujud pada akhir-akhir masa jabatannya dan di kala massa sudah tidak sabar menginginkan perubahan atas banyaknya penyimpangan.

Bismar juga menyadari betul bahwa orang-orang di sekitar Soeharto banyak yang membisikkan hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu, menurut Bismar sudah seharusnya ICMI hadir pada situasi tersebut. Hal itu terutama sekali dibutuhkan ketika Soeharto telah jatuh dari takhta kepresidenan dan dililit masalah, sebagaimana tulisan itu beliau buat pada 06 Juli 1999. Bismar mengajak ICMI untuk memberikan dukungan dan membalas jasa Soeharto, untuk membimbing Soeharto ke jalan pertobatan.

Walaupun demikian, tampak bahwa ICMI, hingga tahun 1999 belum memainkan peran yang cukup penting, selain terlihat sebagai organisasi yang potensial untuk mewujudkan persatuan dan menggalang kebersamaan. Hal itu menurut Bismar terjadi sebagai akibat dari roda organisasi ICMI yang belum berjalan sepenuhnya. Wajar saja, sebab pada masa itu banyak gejolak politik yang timbul dan di antara cendekiawan muslim juga masih terbelah ke dalam kelompok yang menerima dan menolak gagasan yang dibawa oleh ICMI. Akan tetapi, sebagaimana keyakinan yang dipegang Bismar, ICMI harus dapat lebih berperan sebagai harapan bagi Ummat.

## **KESIMPULAN**

Islam dan demokrasi pada masa Orde Baru merupakan dua isu penting yang menarik. Pandangan Bismar Siregar yang menjabat sebagai Hakim Agung pada masa Orde Baru terhadap demokrasi dengan landasan keIslaman dan Islam itu sendiri dapat

menjelaskan kondisi Islam dan demokrasi pada masa Orde Baru. Bismar memperoleh semangat keIslaman dan kelantangan dalam menyuarakan kebenaran dari lingkungan keluarganya terdidik dan religius, kedua orangtuanya merupakan pengurus Muhammadiyah dan Aisyiah. Oleh karena itu pandangan Bismar terhadap demokrasi berlandaskan pada ajaran Islam yang ia pahami, bahwa demokrasi yang berdasarkan Pancasila itu seharusnya membawa semangat kebersamaan. Bismar memandang demokrasi tidak dijalankan dengan semestinya selama masa Orde Baru. Hal itu ditunjukkan dengan Golkar yang berkuasa tunggal selama 32 tahun, penekanan terhadap lembaga negara untuk melindungi para koruptop dari eliet Golkar, pemanfaatan para menteri Golkar sebagai juru kampanye, dan sikap elite Golkar yang tidak mau berkolaborasi dengan orsospol lain. Sementara itu, demokrasi yang berlandaskan keIslaman juga menjadikan Bismar sebagai sosok yang kontroversial dalam sikapnya terhadap eks-PKI. Ia menghendaki agar para keturunan PKI tidak lagi dimusuhi. Namun ada pula pihak yang beranggapan bahwa Bismar menolak untuk membuka kasus PKI karena berusaha melindungi Soeharto, namun hal tersebut tampaknya bersebrangan dengan opini beliau yang lebih awal dikemukakan dan pandangannya yang juga tidak sepakat dengan praktek demokrasi pada masa Orde Baru.

Adapun implikasi lain dari paham demokrasi dengan landasan Islam yang beliau yakini ialah, ia tidak sepakat dengan aksi demonstrasi dan konsep oposisi, yang menurutnya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan keIslaman. Sedangkan semangat Islam beliau lihat pada akhir Orde Baru berada pada ICMI. Terlepas dari sikap yang berbeda terhadap ICMI, beliau memilih untuk mengambil peran sebagai koordinator wilayah, dalam memperjuangkan semangat Islam dan demokrasi pada masa Orde Baru dan periode setelahnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Fajri. 2023. *"Karya Mestika Zed 'Somewhere in The Jungle, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia' dan Pentingnya Bagi Sejarah PDRI Serta Tokoh PDRI Dalam Sejarah Bangsa."* Disertasi, Universitas Andalas.
- Anwar, Samsul. Wawancara dengan penulis, 2018.

- Asnan, Gusti. 2006. "PDRI Dalam Penulisan Sejarah Indonesia." *Makalah Disajikan pada Seminar Nasional "Meninjau Ulang PDRI dalam Sejarah dan Penulisan Sejarah Bangsa," Padang, 26.*
- Erasih, Erasih. 2018. "Tinjauan Historiografi Buku Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Karya Mestika Zed." *Majalah Ilmiah Tabuah: Talimat, Budaya, Agama dan Humaniora* 22 (1): 29-42.
- Iriyanis. Wawancara dengan penulis, 2018.
- Jasri, Patri Domelia. 2022. "Peran Syekh Ibrahim Terhadap Islamisasi Masyarakat Sumpur Kudus Pada Abad Ke-16 M." *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* 28 (1): 24-39.
- Kahin, Audrey R. 1999. *Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity*. Amsterdam: Amsterdam University Press. (Buku ini membahas peran Sumatera Barat, termasuk PDRI, dalam politik Indonesia).
- Malano, Yusbardi Gindo. Wawancara dengan penulis, 2018.
- Rasyid, Mohammad. "Perjuangan PDRI di Sumatera." *Jurnal Sejarah Indonesia*, 2019.
- Setiawan, Haryanto. *Sejarah Perjuangan PDRI di Sumatera Barat*. Padang: Universitas Negeri Padang Press, 2015.
- Sudirman, Jenderal. "Surat-surat untuk PDRI: Pengalaman dan Refleksi." *Penerbit Sejarah Indonesia*, 2021.
- Zed, Mestika. 2001. *Somewhere in the Jungle: Pemerintahan Darurat Republik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.